

DEMOKRASI PENDIDIKAN ISLAM

Siti Romlah

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Indonesia

Abstract: Democracy can certainly shape the character of the community component that is able to uphold the values of freedom and difference in the diversity of society. Therefore, democratic policy initiatives can include: decentralization policies, the consequences of adequate human resource needs, adequate learning support facilities, and leads to the diversity of individual human potential aspects.

The democratic system is a form of action that respects differences in principles, diversity (heterogeneity) of the values of society in a country. The logical consequence of applying democracy is to give freedom to act on each person according to his will within certain normative limits. The formation of a democratic culture in a country is largely determined by the application of the prevailing education system.

Democracy in Islamic education has consequences for the formation of decentralization of authority, where the management of education will be largely determined by direct implementers, both managers, education staff, and the community in creating content or material, learning systems, including developing the quality of students. On the other hand, educational democracy will also have an impact on aspects of the curriculum, administrative efficiency, income and costs of education, and even distribution of public education.

Keywords: Democracy in Islamic education.

Pendahuluan

Peranan pendidikan dalam kehidupan kenegaraan akan banyak memberikan dimensi pembangunan karakter bangsa (*Nations character building*). Aktualisasi karakter masyarakat dapat membentuk nilai-nilai budaya yang tumbuh pada komunitas lingkungan sosial-politik, baik dalam bentuk berpikir, berinisiatif, dan aneka ragam hak asasi manusia. Dengan demikian, pendidikan senantiasa melahirkan nilai tata kehidupan masyarakat dalam sistem kenegaraan yang di anut oleh suatu pemerintahan.

Pada kondisi Negara yang memiliki masyarakat heterogenitas, cenderung menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Konteks demokrasi secara sederhana menunjukkan adanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip utama dalam penerapan alam demokrasi adalah adanya pengakuan atas kebebasan hak individual terhadap upaya untuk menikmati hidup, sekaligus dalam mekanisme menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga, pada gilirannya dapat membentuk kondisi *community development* pada nilai-nilai keberagaman, baik berpikir, bertindak, berpendapat, maupun berkreasi. Agar semakin demokratis pelaksanaan pendidikan suatu Negara, akan memberikan implikasi pada peningkatan taraf kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam menggunakan pikiran, tenaga, dan suaranya. Impact yang sangat kuat dari penerapan demokrasi pendidikan yaitu berkembangnya keberagaman pola pikir masyarakat, kreatifitas, dan daya inovasi yang tinggi.

Pembahasan Demokrasi Pendidikan

Demokrasi tidak seperti sosialisme ilmiah yang jelas-jelas dirumuskan oleh Karl Marx, agak sulit menemukan tokoh yang menggagas demokrasi secara final. Namun setidaknya ada teori yang mendasari konsep demokrasi modern, yaitu teori kontrak sosial yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1704).¹ Walaupun John Locke tidak pernah menyebut kata demokrasi secara eksplisit, tapi paling tidak teorinya memberikan konsep dasar tentang kedaulatan rakyat dan konsep negara hukum. Konsep kedaulatan rakyat sebenarnya merupakan tanggapan John Locke terhadap lingkungan politik yang mengelilinginya pada saat itu, yaitu kondisi Eropa pada abad XVII. Saat itu, dogma yang menyatakan bahwa kedaulatan merupakan pemberian dari Tuhan kepada seorang raja (*divine right of king*) masih di jadikan dasar dalam melegitimasi kekuasaan monarki absolut di Eropa. Ketaatan kepada raja dianggap sebagai konsekuensi iman dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktek keagamaan. John Locke membantah dogma ini dengan menyatakan bahwa kedaulatan bukanlah sesuatu yang *given* dari Tuhan. Untuk menopang pernyataannya itu dia melakukan pembuktian dengan *menelisis* asal-usul terbentuknya institusi politik.²

John Locke menjelaskan asal-usul terbentuknya institusi politik dengan melakukan hipotesa terhadap perkembangan kehidupan sosial manusia mulai dari fase sebelum terbentuknya institusi politik. Untuk itu, dia terpaksa harus menggambarkan keadaan alamiah manusia (*state of nature*). Keadaan alamiah adalah keadaan asal mula manusia yang asli, sebelum ada rekayasa sosial apapun, termasuk pembentukan negara. Menurut John Locke, pada dasarnya manusia adalah individu yang bebas. Dalam keadaan alamiah masyarakat merupakan sejumlah manusia yang hidup bersama dengan kehidupan individual masing-masing.

Manusia tidak di satukan oleh apa yang di sebut dengan kepentingan bersama. Mereka semua merupakan manusia yang sederajat dan hidup merdeka tidak di bawah kekuatan superior apa pun. Dengan begitu dia tidak melihat hubungan antar manusia sebagai suatu unit organisme (tubuh) sosial yang bukan lagi sekedar kumpulan manusia, seperti halnya yang di pahami oleh Marx, Hegel atau Plato.

Hipotesis yang hampir sama telah di kemukakan oleh Thomas Hobbes. Hanya saja, menurut Hobbes, jika manusia hidup bersama dan masing-masing bebas berbuat sesuai kepentingan masing-masing maka yang terjadi adalah keadaan perang. Sebab kebebasan manusia selalu bergesekan dengan kepentingan manusia lain. Jika hal itu dibiarkan tanpa ada yang mengatur, yang ada hanyalah kekacauan. Maka dari itu, Hobbes mengajukan teori kontrak sosial yang memberikan kedaulatan penuh kepada *leviathan*.³ Yaitu kekuatan politik yang membuat semua

¹ M. Khoirul Anam, From: <http://www.pendidikan.net/mk-anam.html>. Diakses tanggal 15 November 2008

² Ibid

³ Hujair AH. Sanaky, 1999, "*Studi Pemikiran Pendidikan Islam Modern*", Jurnal Pendidikan Islam, Kosep dan Implementasi, Volume V Th IV, ISSN: 0853 – 7437, FIAI UII, Yogyakarta, Agustus 1999. From: <http://Bpk.penabur.or.id/berita/200006/artikel2.htm>. Diakses tanggal 15 November 2008

orang tunduk kepada hukum. Dengan begitu, Hobbes telah memisahkan keberadaan monarki absolute.

Problematika Demokrasi Pendidikan Islam

Masalah mendasar pendidikan Islam ialah tidak jelasnya paradigma pendidikan Islam. Antara paradigma ideologis dan paradigma ilmiah bercampur sedemikian kompleks sehingga berkembang kemudian adalah paradigma ideology ilmiah atau pseudo ilmiah. Akibatnya, tradisi pemikiran ilmiah yang kreatif, dinamis, dan terbuka dalam tradisi Islam sebagaimana hakikat wahyu benar-benar sulit berkembang.⁴

Problem metodologis dalam pendidikan Islam sebagaimana diatas sampai hari ini belum pernah terselesaikan secara tuntas. Pembahasan mengenai problem tersebut selalu terhambat oleh aturan-aturan yang membatasi pemikiran ilmiah secara sempit dalam ortodoksi klasik. Dengan adanya pembatasan tersebut melahirkan pembakuan atau standarisasi sebuah pemikiran dan hanya satu pemikiran saja yang di anggap benar. Pemikiran yang berada di luar aturan tersebut termasuk murtad dan memasuki wilayah larangan. Pemikiran dan karya intelektual yang segar dan dinamis yang mampu melakukan perubahan serta menjadi mobilitas social sebagaimana yang di harapkan masyarakat mustahil akan lahir bila ideologi ilmiah yang dianggap standart tersebut masih berperan secara vital serta mengawasi dan mengontrol secara ketat pengembangan dakwah Islam dan seluruh aktifitas pendidikan Islam yang meliputi proses pembelajaran dan penyusunan kurikulumnya. Pengembangan pemikiran dan pendidikan Islam pada umumnya masih berada pada proses pembersihan pemikiran Islam yang hanya terpusat pada hasil pemikiran klasik yang ortodok. Padahal hasil pemikiran tersebut tidak mutlak keberadaannya, serta kesemuanya belum tentu relevan bila di terapkan pada kondisi hari ini. Bukan berarti pula kita menolak keseluruhan dari pemikiran klasik tersebut, tetapi perlu dilakukan verifikasi dan kajian ulang hasil pemikiran tersebut sebagaimana kritikan yang dilakukan Al Ghazali terhadap filsafat empiris dan rasional. Karena yang dilakukan Al Ghazali merupakan bukti bila ia berfilsafat, dan penolakan yang dilakukan bukan pada metodologi filsafatnya tetapi hasil final dari filsafat empiris dan ilmiah tersebut.

Demokrasi dalam pendidikan Islam memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, dimana pengelolaan pendidikan akan banyak di tentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelolah, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam menciptakan isi atau materi, sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik. Disisi lain, demokrasi pendidikan akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan masyarakat.

Metode pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Islam sebenarnya banyak terpengaruh oleh prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam sendiri sejak kelahirannya selalu menyerukan adanya prinsip kebebasan dan persamaan dalam belajar, sehingga terbukalah jalan untuk belajar bagi semua orang, pintu masjid dan institute-institute terbuka untuk semua orang, tanpa memandang perbedaan antara

⁴Abdul Munir, *Paradigma Intelektual Muslim*, hlm.203

si kaya dan si miskin, tinggi atau rendahnya kedudukan social seorang siswa, oleh karena didalam Islam tidak ada kelebihan orang Arab dari yang bukan arab, kecuali dari taqwanya.⁵

Dalam menciptakan pendidikan Islam yang lebih demokratis dan dalam rangka menghadapi perubahan masyarakat global, ada beberapa persoalan mendasar internal pendidikan Islam yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

Pertama harus mengikis habis wawasan sejarah pendidikan Islam yang tidak sesuai dengan gagasan yang di bawa Al-Qur'an, berupa persoalan dikotomik pendidikan Islam yang merupakan persoalan mendasar dari perkembangan pendidikan Islam selama ini. Pendidikan Islam harus di jauhkan dari dikotomik, menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama.

Berkaitan dengan hal tersebut, yang pertama kali harus di lakukan adalah kemandirian dalam segala aspek. Dengan kemandirian tersebut, akan melindungi proses pengembangan pendidikan Islam dari berbagai intervensi yang akan memperkosa proses pengembangan pendidikan Islam untuk tetap bersiteguh berdiri pada konsep yang murni dari Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk memberdayakan bangsa yang mayoritas muslim ini.⁶

Memang diakui, bahwa untuk mengikis habis persoalan di kotomik bukan hal yang mudah, karena akan berhadap dengan kontraveksi pemikiran antar pemikiran konvensional [tradisional] dengan pemikiran kontemporer modern. Tetapi pada sisi lain, diakui bahwa secara perlahan pendidikan Islam telah melakukan perubahan dengan mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Misalnya saja, kebijakan konvergensi yang diambil Departemen Agama [Depag] dengan memperkecil perbedaan antara pola pendidikan di lembaga umum dan lembaga agama awalnya direspons pendidikan Islam secara "malu-malu kucing" dan istilah Karel Steembrink, "menolak sambil mengikuti". Artinya, pada akhirnya pendidikan Islam juga melakukan proses adaptasi dengan mengembangkan sistem mengikuti pendidikan umum.

Maka kita harus mengikis habis wawasan sejarah pendidikan Islam yang tidak sesuai dengan gagasan yang dibawa al-Qur'an. Azyumardi, menekankan bahwa perubahan bentuk dan isi pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari tuntunan perubahan zaman. Menurutnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memiliki visi keislaman, kemodernan, kekinian, masa depan dan kemanusiaan agar compatible dengan perkembangan zaman.⁷

Kedua, perlu pemikiran kembali tujuan dan fungsi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Artinya lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya berorientasi untuk memenuhi keinginan kepentingan akhirat saja dengan mengajarkan keterampilan beribadah saja. Hal tersebut masih di rasakan apabila pendidikan Islam di pandang dari dimensi ritual masih jauh dalam memberikan pengayaan spiritual, etika dan moral ilahiyah.⁸ Memang diakui, bahwa peserta didik secara

⁵ M. Athiyah, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. hlm. 5

⁶ Ahmad Syafii Maarif, 1997: 67

⁷ Azyumardi Azra, <http://islamib.com/wawancara/azra3.html>, 6/27/2003. Diakses tanggal 23 November 2008

⁸ A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, :52

verbal kognitif dapat memahami ajaran Islam dan terampil dalam melaksanakannya, tetapi kurang menghayati kedalaman maknanya.

Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus menjadikan pendidikannya tersebut sebagai tempat untuk mempelajari ilmu agama [spiritual *ilahiyyah*], ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan atau kemahiran, seni dan budaya serta etika dan moral *ilahiyyah*.

Selain persoalan tersebut, pendidikan Islam sekarang ini juga di hadapkan pada persoalan-persoalan yang cukup kompleks, yakni bagaimana upaya untuk membangun paradigma baru pendidikan, manajemen dan organisasi, metode pembelajaran untuk dapat mempersiapkan manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dalam menghadapi perubahan masyarakat global yang begitu cepat, sehingga produk pendidikan Islam tidak hanya melayani dunia modern, tetapi mempunyai pasar baru atau mampu bersaing secara kompetitif dan proaktif dalam dunia masyarakat modern, global dan informasi.

Solusi Demokrasi Pendidikan Islam

Perubahan yang perlu di lakukan pendidikan Islam, yaitu:

1. Membangun sistem pendidikan Islam yang mampu mengantisipasi kemajuan iptek untuk menghadapi tantangan dunia global menuju masyarakat indonesia baru yang di landasi dengan nilai-nilai *ilahiyyah*, kemanusiaan [*insaniyyah*], dan masyarakat, serta budaya.
2. Menata manajemen pendidikan Islam dengan berorientasi pada manajemen berbasis sekolah agar mampu menyerap aspirasi masyarakat, yang dapat mendayagunakan potensi masyarakat, dan daerah [otonomi daerah] dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Islam yang berkualitas.
3. Meningkatkan demokratisasi penyelenggaraan pendidikan Islam secara berkelanjutan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat menggali serta mendayagunakan potensi masyarakat.

Dari uraian diatas, menegaskan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mendesain model-model pendidikan alternatif yang lebih demokratis yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sekarang ini.

Penerapan Demokrasi Pendidikan Islam

Membangun sebuah paradigma baru bukanlah hal yang mudah. dalam menciptakan pendidikan Islam yang lebih demokratis jalan yang termudah adakah dengan menciptakan model atau desain baru sebagai alternative pendidikan yang ideal. Meminjam prinsip hakekat pendidikan Islam yang di gunakan Hasim Amir, yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang *integralistik*, *humanistik*, *pragmatik* dan *berakar pada nudaya kuat*.⁹ Tawaran Hasim Amir ini, yang di kutip A. Malik Fadjar, dapat digunakan sebagai konsep demokratisasi pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan masyarakat indonesia, yaitu :

1. Pendidikan *integralistik*, merupakan model pendidikan yang diorientasikan pada komponen-komponen kehidupan yang meliputi:

⁹ Ibid.:37

pendidikan yang berorientasi pada *rabbaniyah* [ketuhanan], *insaniyah* [kemanusiaan] dan *alamiyah* [alam pada umumnya], sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan yang baik dan untuk mewujudkan *rahmatan lil 'alamin*, serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individual-sosial. Pendidikan integralistik diharapkan dapat menghasilkan manusia [peserta didik] yang memiliki integralitas tinggi, yang dapat bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, menyatu dengan dirinya sendiri sehingga tidak memiliki kepribadian belah atau kepribadian mendua, menyatu dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan disintegrasi sosial, dan dapat menyatu dengan alam sehingga tidak membuat kerusakan, tetapi menjaga, memelihara dan memberdayakan serta mengoptimalkan potensi alam sesuai kebutuhan manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber dari konsep Ketuhanan [*Teosentris*], artinya pendidikan Islam harus berkembang dan dikembangkan berdasarkan teologi tersebut. Konsep kemanusiaan, artinya dengan konsep ini dapat dikembangkannya antropologi dan sosiologi pendidikan Islam, dan konsep alam dapat dikembangkan konsep pendidikan *kosmologi* dan ketiga konsep ini harus dikembangkan seimbang dan integratif.

2. Pendidikan yang *humanistik*, merupakan model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia [humanisasi], yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan *fitrahnya*. Maka manusia sebagai makhluk hidup, ia harus mampu melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya. Maka posisi pendidikan dapat membangun proses humanisasi, artinya menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan di perlakukan dengan adil, hak untuk menyuarahkan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya. Pendidikan humanistik, diharapkan dapat mengembalikan peran dan fungsi manusia yaitu mengembalikan manusia kepada *fitrahnya* sebagai sebaik-baik makhluk. Maka, manusia “yang manusiawi” yang dihasilkan oleh pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk manusia berpikir, berasa dan berkemauan serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat mengganti sifat individualistik, egoistik, egosentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat menghormati dan dihormati, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan, sifat menghargai hak-hak asasi manusia, sifat menghargai perbedaan dan sebagainya.
3. Pendidikan *pragmatik* adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik bersifat jasmani maupun rohani, seperti berpikir, merasa, aktualisasi diri, keadilan, dan kebutuhan spiritual *ilahiyah*. Dengan demikian, model pendidikan dengan pendekatan pragmatik diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka

terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.

4. Pendidikan yang *berakar pada budaya*, yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa, kelompok etnis, atau suatu masyarakat tertentu. Maka dengan model pendidikan yang berakar pada budaya, diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri, dan membangun peradaban berdasarkan budaya sendiri yang akan menjadi warisan monumental dari nenek moyangnya dan bukan budaya bangsa lain.¹⁰ Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita menjadi orang yang anti kemodernan, perubahan, reformasi dan menolak begitu saja arus transformasi budaya dari luar tanpa melakukan seleksi dan alasan yang kuat. Selanjutnya, dari keempat model yang dikemukakan di atas, dapat ditarik lagi pada desain model pendidikan Islam yang lebih operasional, yaitu:

Pertama, mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Dengan demikian, visi, misi dan tujuan pendidikan, kurikulum dan materi pembelajaran, metode pembelajaran, manajemen pendidikan, organisasi dan sumber daya pendidikan [guru dan tenaga administrasi] harus disesuaikan dengan kebutuhan serta sesuai visi, misi dan tujuan pendidikan tersebut. Model pendidikan umum Islami, kurikulumnya bersifat integratif antara materi-materi pendidikan umum dan agama, sehingga mampu mempersiapkan intelektual Islam yang berfikir secara komprehensif. Atau meminjam istilah Fazlur Rahman, yaitu model pendidikan sekuler modern dan mengisinya dengan konsep-konsep Islam, untuk melahirkan intelektualisme muslim yang tangguh, walaupun Ahmad Syafii Maarif, menolak hal ini yaitu kita tidak perlu berteriak untuk mengislamkan ilmu modern.

Kedua, model pendidikan Islam yang tetap mengkhususkan pada desain “pendidikan keagamaan” seperti sekarang ini. Artinya harus mendesain ulang model “pendidikan Islam” yang berkualitas dan bermutu, yaitu : [1] dengan merumuskan visi dan misi serta tujuan yang jelas, [2] kurikulum dan materi pembelajaran diorientasikan pada kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat untuk dapat menjawab tantangan perubahan, [3] metode pembelajaran diorientasikan pada upaya pemecahan kasus [problem solving] dan bukan dominasi ceramah, [4] manajemen pendidikan diorientasi pada manajemen berbasis sekolah, [5] organisasi dan sumber daya guru yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bidangnya masing-masing. Maka pendidikan Islam akan mampu bersaing dengan mampu mempersiapkan dan melahirkan mujtahid-mujtahid yang tangguh, berkualitas dan berkaliber dunia dalam bidangnya sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan aktual atau

¹⁰ A. Malik Fadjar, 1999:37-39

kontemporer sesuai dengan kebutuhan perubahan zaman. Desain model pendidikan seperti ini, harus secara “selektif menerima” pendidikan produk barat, berarti harus mendesain model pendidikan yang betul-betul sesuai dengan konsep dasar Islam dan sesuai dengan lingkungan sosial-budaya Indonesia. Kata Fazlur Rahman, apabila kita ingin membangun pendidikan Islam yang berkualitas, harus kembali kepada al-Qur’an dan Qur’an harus ditempatkan sebagai pusat intelektualisme Islam.¹¹

Ketiga, model pendidikan agama Islam tidak dilaksanakan disekolah-sekolah formal tetapi dilaksanakan di luar sekolah. Artinya pendidikan agama dilaksanakan di rumah atau lingkungan keluarga, mesjid dan lingkungan masyarakat [tempat-tempat pengajian dan Masjid] dalam bentuk kursus-kursus, kajian-kajian keagamaan, keterampilan beribadah dan sebagainya. Pendidikan agama akan menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat atau meminjam konsep Yahya Muhaimin yang dikemukakan terdahulu bahwa pendidikan berbasis keluarga [*family-based education*] dan pendidikan berbasis masyarakat [*community-based education*]. Pendidikan Islam, dapat ditanamkan dan disosialisasikan secara intensif melalui basis-basis tersebut, sehingga pendidikan agama sudah menjadi kebutuhan [*need*] dan based dalam pribadi peserta didik. Maka dalam proses belajar mengajar di sekolah pendidikan agama telah menjadi kebutuhan dan perilaku [*afektif* dan *psikomotorik*] yang aktual, bukan lagi berupa pengetahuan [*knowledge*] yang dihafal [*kognitif*] dan diujikan secara kognitif pula.

Keempat, desain model pendidikan diarahkan pada dua dimensi, yakni: [1] dimensi dialektika [horisontal], pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan sosialnya. Manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia sekitarnya melalui pengembangan Iptek, dan [2] dimensi ketundukan vertikal, pendidikan selain menjadi alat untuk memantapkan, memelihara sumber daya alam, juga menjembatani dalam memahami fenomena dan misteri kehidupan yang abadi dengan Maha Pencipta.¹² Berarti pendidikan harus disertai dengan pendekatan hati, artinya pendidikan harus membangun hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan.

Keempat model pendidikan Islam yang dikemukakan di atas merupakan tawaran desain dan model pendidikan Islam yang perlu diupayakan untuk membangun paradigma pendidikan Islam yang lebih demokratis dalam menghadapi perkembangan perubahan zaman modern dan memasuki masyarakat madani Indonesia. Kecenderungan perkembangan semacam, dalam mengantisipasi perubahan zaman dan merupakan hal yang wajar-wajar saja. Sebab kondisi masyarakat sekarang ini bersifat praktis-pragmatis dalam hal aspirasi dan harapan terhadap pendidikan, sehingga pendidikan tidak statis atau hanya berjalan di tempat

¹¹ Fazlur Rahman, 1985:1

¹² M. Irsyad Sudiro, 1995:2

dalam menatap persoalan-persoalan yang dihadapi pada era masyarakat modern, post masyarakat modern dan masyarakat global.

Dengan demikian, apapun model pendidikan Islam yang ditawarkan pada dasarnya harus berfungsi untuk memberikan kaitan antara peserta didik dengan nilai-nilai *ilahiyyah*, pengetahuan dan keterampilan, nilai-nilai demokrasi, masyarakat dan lingkungan sosiokulturalnya yang terus berubah dengan cepat, sebab pada saat yang sama pendidikan secara sadar juga digunakan sebagai instrumen untuk perubahan dalam sistem politik, ekonomi secara keseluruhan.

Penutup

1. Paradigma pendidikan yang mengarah pada era demokrasi banyak memberikan konsekuensi logis dalam mempersiapkan kondisi masa transisi budaya. Masyarakat yang mengalami situasi demokrasi umumnya lebih menghargai perbedaan pandangan dan keberagaman status sosial. Demokrasi pendidikan tidak terlepas dari peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan sasaran kualitas yang diinginkan. Dengan kata lain, demokrasi pendidikan sangat terkait dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menentukan kebijakan pendidikan, melalui mekanisme bottom-up. Namun pada kenyataannya sampai saat ini suasana itu belum terwujud karena pemegang kebijakan pendidikan Islam masih banyak terpengaruh oleh pemikiran yang dogmatis.
2. Demokrasi pendidikan Islam, dipengaruhi oleh suatu kondisi pluralisme masyarakat yang memiliki heterogenitas linguistik, budaya, dan letak geografis. Sehingga keseragaman pola pendidikan yang pernah dilakukan pada pemerintahan orde baru, sangatlah tidak tepat, sehingga akan menciptakan karakter bangsa yang serba seragam. Oleh karenanya, pada era reformasi, demokrasi pendidikan mengalami pergeseran paradigma ke arah keberagaman. Bahwa setiap daerah memiliki potensi yang berbeda untuk dikembangkan, serta adanya komitmen terhadap pengakuan kebebasan berpikir, pendidikan Islam sebaiknya mencoba memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam menentukan kualitas kemampuan peserta didik serta pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam demokrasi pendidikan Islam adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, rendahnya inisiatif kebijakan demokratis, serta tantangan era globalisasi. Adapun sintesis dan analisis yang diambil sebagai prinsip dasar pelaksanaan demokrasi pendidikan Islam adalah adanya kesamaan hak dan kewajiban setiap warga negara, adanya arah kebijakan dilandasi oleh prinsip bottom-up, adanya partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, berlakunya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
4. Berbagai masalah serta hasil analisis dan sintesis, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menumbuhkan demokrasi diperlukan suatu pendidikan yang turut menunjang peningkatan kualitas masyarakat yang dapat memahami budaya demokrasi, serta pendidikan yang demokratis sangat ditunjang oleh sistem kenegaraan yang demokratis.

5. Berlakunya demokrasi pendidikan secara inheren akan memberikan implikasi terhadap kemampuan masyarakat dalam proses perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan pendidikan. Strategi penerapan demokrasi pendidikan membutuhkan komitmen pengambilan kebijakan yang mengarah pada konsekuensi kondisi demokratis. Dalam dunia pendidikan, alam demokratis lebih ditujukan pada nuansa kebebasan mimbar akademik, dimana seluruh komponen pendidikan memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat serta berpikir kritis terhadap pengembangan daya nalar.

Daftar Rujukan

- Athiyah, Mohd. Al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1984
- Arifin, M, 1991, *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta, Bina Aksara, 1991.
- Azra, Azyumardi., *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, Jakarta, Logo Macana Ilmu, 1999.
- _____*Pendidikan Agama Harus Rasional dan Toleran*, [http : // islamli. Com / Wawancara / azra3.html](http://islamli.com/Wawancara/azra3.html). 6/27/2003. Diakses tanggal 23 November 2008
- Dewantoro, Hajar., “*Urgensi Inovasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Umat*”, dalam *Pengelolaan Pendidikan Sebagai Wahana Pendidikan Muhammadiyah*”, makalah disampaikan pada Rakernas Pendidikan Muhammadiyah, di Pondok Gede, Jakarta.
- Hujair AH. Sanaky, 1999, “*Studi Pemikiran Pendidikan Islam Modern*”, *Jurnal Pendidikan Islam, Konsep dan Implementasi*, Volume V Th IV, ISSN: 0853 – 7437, FIAI UII, Yogyakarta,
- _____, Agustus 1999. From: [http : // . Bpk penabur. or. id / berita / 200006 / artikel2. htm](http://penabur.or.id/berita/200006/artikel2.htm). Diakses tanggal 15 November 2008
- _____, <http://us.clik.yahoo.com/mgejb/5wnjaa/e2laa/brupib/tm>. Diakses tanggal 23 November 2008
- M. Khoirul Anam, From: [http : // www. pendidikan. net / mk- anam. html](http://www.pendidikan.net/mk-anam.html). Diakses tanggal 15 November 2008
- Muhaimin, Yahya [Menteri Pendidikan Nasional], 2000, “*Reformasi Pendidikan Nasional Menuju Indonesia*”, *Majalah Dwiwutan BPK Penabur Jakarta, Midyawarta*, No.69/Thn.XII, [http : // www. bpk. Penabur. or. id / KPS. Jkt / widya / 69 / 69. pdt](http://www.bpk.Penabur.or.id/KPS.Jkt/widya/69/69.pdt). Diakses tanggal 15 November 2008
- Munir, Abdul Mulhan, *Paradigma Intelektual Muslim, Pengantar Filsafat pendidikan Islam*, Yogyakarta, SIPRES, 1993
- Muslih Usa, *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi*, Aditya Media bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah UII, Yogyakarta.
- Rahman, Fazlur., *Islam dan Modernitas tentang Transfomasi Intelektual*, Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka. 198
- Suroyo, 1991, *Berbagai Persoalan Pendidikan; Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Islam, Kajian tentang Konsep Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya*, Volum 1 Tahun 1991, Fakultas Tarbiyah IAIN, Yogyakarta..

- Sudiro, M. Irsyad, *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern*, Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern, Cirebon, Tanggal 30 Agustus – 1 September 1995.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dan Kurun Moderen*, Jakarta: LP3ES, 1994